

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan barang milik daerah memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan. Artinya, apabila pengelolaan barang milik daerah mengalami peningkatan maka kualitas akuntabilitas juga akan meningkat, namun hasil penelitian ini hanya berlaku untuk sampel yang diambil dan tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi.
2. Sistem pengendalian intern memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan. Artinya, apabila sistem pengendalian intern mengalami peningkatan maka kualitas akuntabilitas juga akan meningkat, karena hasil pengujiannya signifikan maka hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk populasi.
3. Pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Maka, apabila pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern telah dilakukan dengan sangat baik maka akan mendorong meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan.

Mitha Persia Prahara, 2014

Pengaruh pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas akuntabilitas keuangan (studi kasus pada skpd pemerintah kabupaten bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, untuk mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, penerapan sistem pengendalian intern menjadi lebih baik dan akuntabilitas keuangan menjadi lebih berkualitas, berikut ini diajukan beberapa saran:

1. Berdasarkan jawaban kuesioner, pengelolaan barang milik daerah termasuk dalam kategori sangat baik namun pada kenyataannya masih ada hal-hal yang masih harus diperhatikan dan diperbaiki lagi seperti pada pengadaan dan penghapusan barang. Dalam pelaksanaannya sangat penting untuk memperhatikan *standard operating procedure* yang ada sehingga pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan besaran organisasi dan tingkat efektivitas serta efisiensi.
2. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, sistem pengendalian intern termasuk kategori sangat baik. Namun pada dimensi kegiatan pengendalian memperoleh skor terendah terutama pada indikator kaderisasi pegawai. Untuk itu masih perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam melakukan kaderisasi pegawai untuk dapat memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mitha Persia Prahara, 2014

Pengaruh pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas akuntabilitas keuangan (studi kasus pada skpd pemerintah kabupaten bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, kualitas akuntabilitas keuangan termasuk dalam kategori yang sangat baik. Namun, masih ada hal yang perlu dibenahi yaitu penyajian data barang milik daerah yang bebas dari salah saji material pada dimensi sistem informasi yang andal. Untuk itu masih perlu dilakukan pembenahan, perbaikan serta peningkatan pada sistem informasi, peningkatan atau pengembangan sistem informasi harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan permasalahan mengenai aset/barang milik daerah serta kelemahan sistem pengendalian intern tidak muncul lagi dalam opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas keuangan seperti kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi dan pengawasan.